

Alasan Pemerintah Nigeria Dalam Mendukung Perusahaan *Shell Petroleum Development Company* dalam Eksplorasi Minyak Nigeria Tahun 2011

Putri Ekalouisia Wulandari¹

Abstract: *The results show that Shell's activities in exploring oil fields in Nigeria have proven to produce good cooperation in the natural resource sector activities in the form of oil which aims to develop the National Economy, Social and Politics of the State and achieve success for the nation and state. This makes the basis that the good cooperation carried out by the company in managing oil exploration in the Nigerian Delta region and the dependence of the Nigerian Government both from an economic point of view, Shell's advanced technology and long-standing good relations are one of the main reasons the government supports its activities and activities carried out by SPDC with the creation of an agreement between the government and related companies and giving full rights to explore oil fields in Nigeria in the form of a 2011 resolution agreement.*

Keywords: *Government of Nigeria, Support, Company, Shell petroleum Development Company, Exploration, Oil, Nigeria.*

Pendahuluan

Nigeria adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat benua Afrika dan memiliki keberagaman flora dan fauna, Nigeria juga kaya akan kandungan mineral, minyak bumi, dan gas (migas) (Agustin, 2014). Diketahui bahwa terdapat setidaknya 27 milyar barrel cadangan minyak bumi di tahun 1960 hingga 1970an hal ini menyebabkan Nigeria menjadi negara produsen minyak urutan ke-6 di dunia pada tahun 2008 (Husein, 2018).

Melihat potensi minyak yang tinggi di Nigeria, pada tahun 1969, pemerintah Nigeria menetapkan *Petroleum Decree* No. 51. Dekrit ini memonopoli pembagian semua penerimaan yang berasal dari minyak kepada pemerintah pusat untuk menguatkan kepemilikan negara dalam industri minyak, melalui undang-undang tersebut negara memiliki kontrol yang besar untuk menjamin konsesi dan meningkatkan keterlibatannya dalam aktivitas kilang minyak, distribusi, dan pemberian harga terhadap minyak mentah (Chairawaty, 2014).

Sebagai negara penghasil minyak yang besar, minyak di Nigeria diminati oleh perusahaan dalam negeri maupun asing. Salah satu perusahaan yang tertarik akan kekayaan sumber minyak di Nigeria adalah *Shell Petroleum Development Company* (SPDC). SPDC mulai beroperasi di Nigeria sejak tahun 1936 dan melakukan eksplorasi berdasarkan hak yang diberikan oleh Nigeria pada November 1938 dan 18 tahun kemudian pada 15 Januari 1956, SPDC untuk pertama kalinya berhasil menemukan dan mengeksplorasi sumber minyak di kota Oloibiri (shell.com.ng, 2010).

Dua tahun paska eksplorasi di Oloibiri, pada tahun 1958 SPDC melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Belanda yaitu *D'Archy Exploration Company*, untuk melakukan aktivitas pencarian dan pengeboran minyak di wilayah Desa Kegbara Dere, Ogoni, Niger Delta. Di wilayah baru ini, SPDC melakukan kegiatan peninjauan lahan, pemilahan terhadap lahan yang akan dibor sebagai lahan produksi yang melakukan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : putriekalouisia95@gmail.com

kegiatan eksplorasi terhadap minyak yang akan digarap oleh SPDC. SPDC memegang 25 produksi onshore dan 6 produksi offshore (reports.shell.com, 2013).

Sejak 1958 – 1993, SPDC melakukan eksplorasi minyak dengan kapasitas 75.000 barrel per hari, di sekitar lebih 90 ladang atau sumur minyak. Kegiatan ini memiliki area konsesi sebesar 31.000 km ditambah dengan 4000 mil saluran pipa minyak. Selama beroperasi lebih kurang 35 tahun, SPDC mendapat keuntungan hingga mencapai US\$30 miliar dari minyak yang dikelola ([Agustin, 2014](#)).

Hingga pertengahan tahun 2004, kinerja minyak yang dikelola oleh SPDC masih menunjukkan kinerja yang positif dari sisi produksi. Diketahui bahwa pada tahun tersebut SPDC menghasilkan keuntungan paling banyak dari produksi minyak mentahnya yakni 314.000 barel per hari (shell.com, 2005). Namun pada tahun 2005 hingga 2009 produksi minyak SPDC mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh ledakan pipa minyak pada akhir tahun 2004 dan akhir tahun 2006 (liputan6.com, 2006).

Penurunan kinerja minyak di Nigeria masih berlanjut hingga 2009, yang turut dipengaruhi oleh pencurian minyak oleh militan di Nigeria, sebagai dampak dari konflik antara SPDC dan *The Movement for the Emancipation of the Niger Delta* (MEND) ([Wardhany, 2015](#)). MEND adalah pemicu atas pembajakan pipa dan kendaraan pengangkut minyak yang setelah itu dibawa ke tempat yang masih merupakan wilayah Niger Delta yaitu desa Gokana untuk melakukan penyulingan. Tindakan MEND tersebut menghambat eksplorasi minyak SPDC sehingga produksi minyak menurun pada tahun 2008 dan 2009 ([Lindén, 2013](#)).

MEND sendiri adalah kelompok bersenjata yang kecewa terhadap SPDC dan pemerintah Nigeria. Kekecewaan MEND terhadap SPDC atas penerapan *Global Memorandum of Understanding* (GMOU) di tahun 2003 yang tidak dijalankan dengan baik, yang juga merupakan joint venture dengan pemerintah Nigeria. GMOU ini berisikan kesepakatan investasi Gbarain-Ubie Oil and Gas Project dimana joint venture tersebut mampu menanamkan dana untuk mengurangi gas flaring sebesar 3 miliar US \$ (shell.com.ng, 2011).

Kesepakatan investasi Gbarain-Ubie Oil and Gas Project seharusnya mengurangi dampak negatif dari aktivitas pembangunan Gbarain-Ubie. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, tidak memberikan alternatif cadangan air minum kepada masyarakat, tidak adanya listrik bagi masyarakat, konstruksi pipa juga dilakukan tanpa melakukan sosialisasi mengenai langkah-langkah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana dan rendahnya komitmen pemerintah.

SPDC tidak transparan dalam kompensasi tumpahan minyak yang hanya berinteraksi dengan para elite pemerintah lokal, hal ini dianggap oleh masyarakat bukan sebagai pendekatan kepada masyarakat untuk menciptakan interaksi yang lebih aman dalam hal pembangunan fasilitas gas bersama di Niger Delta (allafrica.com, 2010).

Adapun kekecewaan MEND terhadap Pemerintah Nigeria bahwa sebelum tahun 2011 masyarakat “dilibatkan” dalam Rancangan Kebijakan atas persoalan SPDC. Namun, Pada kenyataannya di tahun 2011 respon pemerintah yang berbeda, sebelumnya direspon kebijakan dengan pro rakyat namun tidak diindahkan oleh Presiden Goodluck Jonathan yang terpilih sebagai Kepala Negara Nigeria di tahun 2011 dengan direspon pemberian izin (*Oil Prospecting License*) OPL 245.

MEND sebagai representasi masyarakat tidak dilibatkan oleh Pemerintah dan mengabaikan tuntutan masyarakat Nigeria. Selain tuntutan tanggung jawab SPDC

dalam permasalahan dampak lingkungan, masyarakat juga menuntut adanya pembagian hasil yang adil dan transparansi dalam kebijakan pemerintah.

Presiden Goodluck jonathan memfasilitasi pemindahan hak atas blok minyak yang sangat besar dari Malabu ke SPDC dan Eni Italia pada tahun 2011 dengan memberikan lisensi ladang minyak yaitu berupa Perjanjian Resolusi OPL 245 untuk mengeksplorasi salah satu blok minyak Nigeria yang paling berharga. OPL 245 terletak di tepi selatan Delta Niger dengan kedalaman air lebih dari 1.200 m (Ogundana, et al, 2017).

Dalam kesepakatan Perjanjian Resolusi OPL 245 di tahun 2011 banyak sekali yang tidak sesuai dengan ketentuan fiskal ekonomi atau dengan isi perjanjian yang telah di sepakati terdapat korupsi.

Pemerintah maupun pihak SPDC tidak mengikuti perjanjian yang ada berupa pemulihan terhadap dampak lingkungan yang terjadi, misalnya dana pemulihan dari SPDC sebesar US \$1,1 miliar yang seharusnya diberikan kepada negara namun kenyataannya tidak tersalurkan dengan baik, padahal dana tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan di Nigeria. Permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya permasalahan pada tahun 2011 antara Pemerintah Nigeria, SPDC dan selaku para pihak yang berperan atas lahan blok 245 (saharareporters.com, 2019).

Masyarakat Nigeria beranggapan bahwa operasi minyak yang dilakukan oleh SPDC di Nigeria merugikan. Hal ini ditunjukkan dari gelombang massa yang menolak operasi SPDC. Sejak tahun 1993, kurang lebih sebanyak 300.000 masyarakat Nigeria yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak turun ke jalan untuk melakukan aksi damai menentang kejahatan ekologi yang dilakukan oleh SPDC dan menuntut hak-hak mereka yang selama ini cenderung diabaikan oleh pemerintah (Chairawaty, 2014).

Massa juga meminta pembagian pendapatan (yang berasal dari sumber daya alam) secara adil. Demonstrasi kemudian berujung pada serangan balasan dari pemerintah. Sebanyak 2000 warga meninggal dalam serangan balik tersebut. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mencapai 30.000 orang (Chairawaty, 2014).

Selain itu, operasi SPDC juga dinilai telah berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dan pencemaran gas flare (alat pembakaran gas yang digunakan di pabrik industri seperti kilang minyak bumi) yang dilakukan oleh SPDC Sebagai contoh, dampak kesehatan antara lain diare, sakit mata, kulit gatal, dan dilaporkan terjadi pada anak usia 2 tahun yang dirawat karena kejang demam akibat terkontaminasi oleh minyak mentah (Ordinioha dan Brisibe, 2013).

Dampak pada lingkungan juga terdapat di darat dan lepas pantai seperti pencemaran terhadap laut yang dinilai merusak biota laut seperti ikan, udang, kerang dan sejenisnya. Akibat dari pengeboran yang menyebabkan gelembung gas sehingga limbah minyak tersebut terbawa oleh arus sampai ke pesisir. Kemudian sungai, tanah, udara yang mengandung hidrokarbon dan merusak vegetasi di darat (Azura, 2018).

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat Nigeria yang bergantung pada makanan impor seperti ikan beku dan makanan yang sudah olah, hal ini disebabkan oleh limbah minyak dan polusi minyak yang menghambat warga asli Delta Niger untuk bercocok tanam karena tanah tidak subur dan tangkapan ikan yang buruk sehingga masyarakat lokal kekurangan makanan dan bergantung pada makanan impor (Azura, 2018).

Konflik massa dengan pemerintah yang cenderung membela SPDC terus berlanjut hingga pada tahun 2009, MEND mengancam melancarkan serangan-serangan baru jika SPDC masih beroperasi di Nigeria (internasional.kompas.com, 2009). MEND

juga menyatakan berjuang untuk pembagian hasil minyak yang lebih adil dari kekayaan minyak bagi penduduk setempat (voaindonesia.com, 2010). Oleh karenanya ingin agar operasi SPDC di Nigeria dihentikan.

Meskipun telah mendapat penolakan oleh masyarakat dan menimbulkan konflik berdarah antara masyarakat dengan pemerintah Nigeria, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada SPDC, yang ditunjukkan lewat pemberian lisensi berupa perjanjian blok minyak OPL 245 kepada SPDC di tahun 2011 untuk mengeksplorasi minyak di ladang lepas pantai Nigeria.

Permasalahan yang terjadi di Nigeria kemudian membuat penulis melakukan penelitian yang berjudul “Alasan pemerintah Nigeria mendukung perusahaan SPDC dalam eksplorasi minyak di Nigeria pada tahun 2011.”

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Penulis menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Graham T. Alisson. Menurut pemikiran Graham T. Alisson bahwa keputusan merupakan tindakan dan strategi yang dibentuk oleh pembuat keputusan dalam mencapai sebuah tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional maka ada tujuan yang dipertimbangkan dan dipilih oleh pembuat keputusan untuk dapat dikendalikan sehingga mampu mewujudkan kepentingan nasional.

Kebijakan politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai tindakan rasional dalam hal mengutamakan kepentingan nasional dari lingkungan internasional. Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Adapun tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison, untuk menguraikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu:

Model Aktor Rasional

Dalam model ini pembuatan keputusan politik luar negeri menekankan pada proses intelektual yaitu tahap penentu tujuan, opsi dan pilihan keputusan. Dalam hal ini aktor rasional yang memiliki intelektual untuk dapat memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada dengan asumsi bahwa dalam proses membentuk kebijakan dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan yang dimana masing-masing kebijakan memiliki konsekuensi. Dalam model ini juga digambarkan bahwa untuk melakukan pilihan-pilihan dan alternatif para pembuat keputusan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Dengan berbagai asumsi bahwa Presiden sebagai Aktor rasional mempertimbangkan pilihan yang paling terbaik dengan situasi yang ada dan tindakan secara rasional untuk memaksimalkan perhitungan untung rugi atas masing - masing alternatif tersebut ([Maso’ed, 1990](#)).

Model Proses Organisasi

Dalam model ini menekankan pada proses pengambilan keputusan organisasional, dalam pengambilan suatu keputusan penting tidak hanya dari pilihan rasional saja melainkan elemen - elemen penting turut dipertimbangkan dengan skala prioritas organisasi agar keputusan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga menghasilkan keputusan yang matang melalui proses organisasi.

Model Politik Birokratik

Merupakan proses tawar – menawar (*bargaining games*) antara pemerintah dengan agen pemerintah lainnya yang dimana proses pengambilan keputusan tersebut dirumuskan oleh berbagai kelompok dan lebih bersifat politik. Keputusan yang dipilih tidak sebagai suatu yang dapat menyelesaikan masalah melainkan sebagai hasil tawar menawar dari berbagai konflik dan para pejabat publik saling mengemukakan alternatif untuk menetapkan kebijakan (Allison, 1999). Untuk menjawab rumusan masalah yang diambil, maka penulis menjabarkan ide dari teori tersebut

Gambar 1
Alur Berfikir Teori Decision Making



Sumber: Adaptasi Graham T. Allison dalam Mohtar Mas'ood. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LPE3S, 1990) hlm 275.

Dari ketiga model diatas, penulis menggunakan model aktor rasional yang berorientasi pada individu sebagai pembuat keputusan. Presiden Goodluck Jonathan memberikan bentuk dukungan sebuah lisensi yaitu perjanjian OPL 245 dengan SPDC dan Eni tahun 2011. Seperti yang dijelaskan dalam model ini bahwa pengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut yaitu ingin mencapai tujuan yaitu optimalisasi hasil dan keuntungan ekonomi dengan memikirkan konsekuensi yang terbaik dan terburuk.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Dimana penulis akan melihat dan mencoba menggambarkan alasan pemerintah Nigeria mendukung perusahaan *Shell Petroleum Development Company* dalam eksplorasi minyak di Nigeria tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah skunder yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara *library research* yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, artikel, surat kabar dan majalah yang berasal dari internet atau perpustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) sehingga dapat menjelaskan Alasan Pemerintah Nigeria Dalam Mendukung Perusahaan *Shell Petroleum Development Company* dalam Eksplorasi Minyak di Nigeria Tahun 2011.

Hasil dan Pembahasan

Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) merupakan perusahaan minyak yang memiliki berbagai permasalahan bagi masyarakat Nigeria seperti, memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, baik didaratan dan juga lautan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat Nigeria, yang berujung pada terbentuknya MEND sebagai organisasi yang melawan pemerintah dan SPDC. Namun pemerintah Nigeria terus memberikan dukungannya terhadap SPDC yang dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Resolusi dan Perjanjian Bagi Hasil antara pemerintah Nigeria dan SPDC.

Isi dari Perjanjian Resolusi Blok OPL 245 tahun 2011 menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Pemerintah Nigeria, Malabu Oil and Gas, NNPC, NAE, SNUD dan SNEPCO serta penyelesaian yang disepakati oleh setiap aktor, pada tahun 2010, adapun pertimbangan pemerintah terkait email dan dokumen internal oleh Shell yang menunjukkan bahwa Pemerintah Nigeria jelas merasakan ancaman yang membayangi karena harus membayar sejumlah besar uang sebagai kompensasi, adanya bocoran email dari pihak Shell yang secara tertutup kepada FGN untuk melakukan penyelesaian permasalahan terkait Blok OPL 245. Sebuah surat tertanggal 28 Januari 2007, Jeroen Van der Veer sebagai CEO dari Shell, berusaha menekan Presiden Nigeria pada saat itu yaitu Olusegun Obasanjo, yang mana Shell sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Nigeria atas pencabutan lisensi Blok OPL 245 berdasarkan pada Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Nigeria, Belanda dan Inggris, yang menurut firma hukum Clifford Chance LLP, SNUD berhak atas perlindungan yang telah disepakati dalam BIT antara Belanda dan Nigeria. Sangatlah penting bahwa Clifford Chance LLP dapat menuntut Nigeria untuk mengembalikan hak eksploitasi ke SNUD. Jika Nigeria gagal melakukannya, negara tersebut diharuskan untuk membayar kompensasi.

Pada tanggal 29 April 2011, Jaksa Agung Mohammad Adoke ikut berperan sebagai mediator dalam pembicaraan antara Malabu, ENI, Shell beserta Goodluck Jonathan sebagai Presiden Nigeria pada saat itu. Pembicaraan ini menciptakan kesepakatan hak atas ladang minyak lepas pantai Blok OPL 245 yaitu “Perjanjian Resolusi OPL 245” dengan pembayaran sejumlah \$1,3 miliar kepada pemerintah. Kemudian, Pemerintah Nigeria meneruskan pembayaran sebesar \$800 juta dari jumlah awal Perjanjian Resolusi tersebut kepada mantan menteri Nigeria yaitu Dan Etete selaku pemilik Perusahaan Malabu. Pada saat itu, Dan Etete diduga memberikan sebagian besar uang tersebut kepada para pejabat pemerintah, mantan pejabat serta orang lain yang terlibat sebagai bentuk penyuapan.

Dari isi reolusi 2011 ini kemudian dapat dilihat bahwa pemerintah Nigeria mendukung SPDC dibandingkan Malabu karena ada nya keuntungan dari pemilihan SPDC sebagai yang mengelola Blok OPL 245, selain itu pemerintah Nigeria harus mematuhi setiap hukum yang diatur dalam BIT yang telah disepakati oleh Pemerintah Nigeria dengan SPDC, namun dari kesepakatan itu terdapat perilaku yang bertentangan dalam kesepakatan antara FGN dan perusahaan yang terkait dalam Perjanjian Resolusi 2011. Menurut Global Witness bersama dengan mitranya yaitu *Corner House, Re: Common* dan aktivis Nigeria telah mengatakan bahwa pada kasus ini, besar kaitannya dengan tingkatan korupsi yang terjadi di Nigeria, yang mana dengan cara untuk mempertahankan perusahaan Shell yang ada di Nigeria.

Alasan Pemerintah Nigeria Dalam Mendukung Perusahaan Shell Petroleum Development Company Dalam Eksplorasi Minyak di Nigeria Tahun 2011

Analisis dan pembahasan terhadap alasan Pemerintah Nigeria mendukung SPDC dalam eksplorasi minyak di Nigeria tahun 2011, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Graham T. Alisson secara umum dengan model aktor rasional yang dimana sejak Minyak di Negara Nigeria telah ditemukan pada tahun 1956 yang merupakan sumber daya alam terpenting yang dapat menambah pendapatan devisa negara mampu menjadi pilihan keputusan. Dalam hal ini Pemerintah Nigeria memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada dan tindakan secara rasional dengan berbagai asumsi dalam proses membentuk kebijakan.

Perekonomian Nigeria telah mengalami berbagai macam dinamika, semua itu tak lain karena perekonomian yang amat tergantung pada pendapatan dari industri minyak tersebut. Industri minyak sendiri telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi Nigeria, seperti dana dari hasil produksi yang sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Nigeria berupa royalty serta Pajak yang secara rutin diberikan setiap tahunnya untuk kemajuan Bangsa.

SPDC telah memberikan pemerintah Nigeria keuntungan yang dengan nilai total kurang lebih sebesar \$ 61,3 miliar yang di didapatkan oleh pemerintah pada awal produksi minyak Shell ditahun 1970-1972, (Paul. 2014) dan keuntungan yang didapatkan ini terbagi atas pajak penghasilan \$ 7,8 miliar, royalty pemerintah sebesar \$ 5,9 miliar dan dana sebesar \$ 47,6 miliar dalam bentuk cukai, pajak penjualan, atas bahan bakar Shell, serta produk-produk minyak, gas, kimia dan usaha terpilih lainnya untuk berpartisipasi dalam pencarian serta pengembangan sumber-sumber energi lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan investor yang terus berkembang dan kebutuhan dunia akan energi yang terus bertambah.

Pada tahun 2007-2011 total pendapatan dari minyak mentah mencapai \$38 miliar dengan pembagian untuk pemerintah \$6 miliar merupakan bagian Shell untuk membayar royalty serta pajak eksplorasi kepada pemerintah dan sebesar \$32 miliar merupakan bagian pendapatan setelah biaya masuk ke pemerintah Nigeria dari setiap barel produksi minyak SPDC. Selain itu jika Shell menjalankan proyek di Blok OPL 245 dapat meningkatkan PDB di Nigeria setiap tahunnya (Prinanda. 2014).

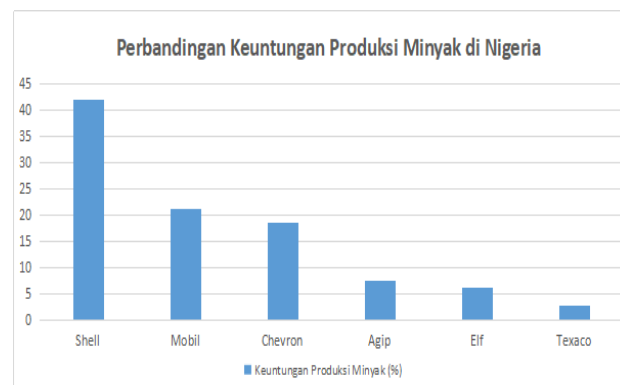
Dampak positif lainnya yang diterima oleh Nigeria yakni dimana Perusahaan Shell dapat membantu Nigeria dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, kontribusi Shell yang lainnya yakni telah membantu anak-anak usia dini di Nigeria untuk dapat mengakses Pendidikan Dasar dan sebagian besar warga Nigeria menerima energi yang aman dan berkelanjutan yang didapatkan dari hasil produksi oleh Perusahaan Shell sehingga kurang lebih jika ditotalkan, nilai kontribusi dari Shell sebesar \$107 Juta. Hal inilah yang menjadi suatu pertimbangan pemerintah terhadap Perusahaan Shell secara rasional untuk memaksimalkan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut.

Selanjutnya, untuk melengkapi analisis dan pembahasan mengenai alasan pemerintah Nigeria mendukung perusahaan Shell dalam eksplorasi minyak di Nigeria pada tahun 2011, penulis akan mencoba menganalisis menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Graham T. Alisson secara umum dengan pendekatan Aktor Rasional.

Ketergantungan Pemerintah Nigeria terhadap Perusahaan Shell

Secara umum, pertimbangan yang di ambil oleh Pemerintah Nigeria sendiri untuk terus mendukung operasi Shell di Nigeria didasarkan pada keuntungan secara rasional yang dikalkulasikan oleh pilihan- pilihan secara ekonomis, yang mana akan lebih baik bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan Shell dibandingkan jika pemerintah menutup operasi Shell dan menyerahkan kepada perusahaan lain, hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan penyebab adanya ketergantungan Pemerintah Nigeria terhadap Shell. Ketergantungan yang terjadi tersebut dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari produksi minyak yang dilakukan Shell lebih besar dari perusahaan asing lainnya, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut;

Grafik 1 Perbandingan Hasil Keuntungan Melalui Produksi yang Dapat Dicapai Oleh Perusahaan Asing di Nigeria



Sumber : www.interscience.wiley.com

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Shell memberikan keuntungan yang lebih besar sebanyak lebih dari 40% keuntungan yang didapat diantara perusahaan-perusahaan penghasil minyak di Nigeria, sehingga Shell sendiri tentunya menjadi pertimbangan besar bagi Pemerintah Nigeria untuk dapat selalu bekerjasama dengan menyumbangkan hasil produksi minyak kepada Nigeria.

Kemudian adapun pertimbangan lainnya oleh pemerintah Nigeria yang dapat membentuk alasan pemerintah untuk tetap mendukung Shell, yang pertama ialah teknologi yang dimiliki oleh Shell. Dapat diketahui bahwa SPDC memiliki sumber daya manusia yang memadai serta pengetahuan dan teknologi yang canggih untuk dapat mengeksplorasi dan mengelola minyak di Nigeria. Walaupun kemudian teknologi yang dimiliki oleh perusahaan minyak lainnya hampir sama dengan Shell contohnya seperti Mobil dan Chevron, namun pemerintah tetap memilih Shell karena keberanian Shell dalam memberikan dana lebih besar kepada pemerintah atas pembagian hasil produksi (Burger. 2011).

Selain pengetahuan dan teknologi yang lebih canggih, bentuk bantuan Shell kepada Nigeria yaitu Shell memberikan ilmu pengetahuan dan meminjamkan teknologi mereka berupa alat untuk mengelola dan memperlancar kegiatan eksplorasi minyak kepada perusahaan NNPC di Nigeria. Selanjutnya, Shell secara cuma-cuma memberikan bantuan kepada pasukan militer Nigeria berupa penyediaan makanan, transportasi, akomodasi dan perijinan untuk menggunakan properti dari Perusahaan Shell, bahkan Shell memberikan dana kepada militer Nigeria dalam melakukan penjagaan di wilayah eksplorasi Shell sebanyak \$383 juta (Amunwa. 2012).

Bantuan yang diberikan oleh Shell ini membuat pemerintah melihat bahwa Shell mampu mengubah keadaan perekonomian Nigeria menjadi lebih baik dari sebelumnya,

seperti menghasilkan kualitas minyak yang baik sehingga nilai jual minyak di Nigeria pun dapat bersaing di Pasar Internasional.

Sektor minyak mentah memainkan peran vital dalam membentuk perekonomian dan nasib politik Nigeria. Satu-satunya kebijakan konsesi untuk meningkatkan dominasi ekonomi Nigeria dalam sektor perminyakan, yaitu memperkenalkan hak eksplorasi eksklusif yang bertujuan untuk mempercepat eksplorasi dan produksi minyak bumi di Nigeria.

NNPC yang merupakan salah satu perusahaan milik Nigeria yang melakukan joint venture dengan SPDC dengan mendapatkan pembagian hasil produksi minyak sebesar 55%, sementara SPDC mendapat pembagian hasil keuntungan sebesar 45%, sesuai dalam *Production Sharing Agreement* yang dimana menyatakan bahwa (Hubert. 2018):

Tabel 1 Pembagian Keuntungan Menurut *Production Sharing Agreement* Tahun 2005

Produksi Kumulatif	Pembagian Pemerintah	Pembagian Kepada Shell
0-350	30%	70%
351-750	35%	65%
751-1000	47.50%	52.5%
1001-1500	55%	45%
1501-2000	65%	35%
Lebih dari 2000	Pemutusan melalui Negosiasi	Pemutusan melalui Negosiasi

Sumber: Government Revenues from OPL 245 Assessing the Impact of Different Fiscal Terms <https://www.globalwitness.org/documents/19525/R4D-Nigeria245-GovernmentRevenueAnalysis-Final.pdf>.

Dalam tabel dijelaskan mengenai pembagian keuntungan antara pemerintah dan Shell dalam pembagian keuntungan ini menurut hasil produksi secara kumulatif perbulannya di seluruh wilayah yang menjadi tempat produksi minyak di Nigeria termasuk Blok OPL 245, sehingga hal ini membuktikan bahwa begitu besarnya pemasukan kas negara dibanding dengan SPDC. Tidak hanya itu, pemerintah di sisi lain juga diuntungkan karena seluruh sarana, prasarana maupun biaya eksplorasi minyak sebelumnya ditanggung sendiri oleh SPDC. Melalui SPDC, NNPC juga akan menerima tambahan jumlah minyak sebagai biaya royalti dan konsensi tambahan dari SPDC.

Selain faktor keuntungan melalui pendanaan yang diberikan oleh Shell kepada pemerintah, terdapat juga BIT yang berisikan mengenai kesepakatan pemerintah dengan Shell dalam melakukan produksi dan eksplorasi di wilayah Nigeria yang memiliki cadangan minyak mentah. Namun terdapat juga faktor - faktor lain yang mempengaruhi dilanggengkannya eksistensi Shell di Nigeria yaitu kedekatan secara eksklusif yang terus terjalin dengan pemerintah bahkan presiden Nigeria yang pada masa jabatan Goodluck Jonathan yang merupakan Presiden Nigeria pada tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus yang terjadi antara Malabu dan Shell yang bersengketa dalam pengelolaan Blok OPL 245.

Terdapat skema aliran dana yang terjadi dalam konflik Blok OPL 245 antara pemerintah, SPDC dan Malabu, yang menjadikan pemerintah Nigeria memiliki alasan lain dalam mempertahankan Shell. Korupsi yang dilakukan ini kemudian mengindikasikan bahwa hubungan pemerintah dan Shell sudah sangat dekat, karena Shell juga membiarkan hal tersebut terjadi.

Shell bersama dengan Pemerintah Nigeria memainkan peran penting dalam membantu memenuhi permintaan energi dunia yang semakin meningkat dengan melanjutkan kontrak eksplorasi minyak di ladang baru, yaitu Blok OPL 245. Selain Shell, terdapat pula Perusahaan Multinasional lain yang turut berpartisipasi di ladang

Blok OPL 245, yakni ENI Italia. Kemudian, pemerintah melihat peluang komersial dengan adanya sebuah kesepakatan melalui Perjanjian Resolusi 2011.

Bila ditinjau kembali bahwa minyak mentah yang ada di Blok OPL 245 sebesar 9,23 miliar barrel dan ini belum dihitung dengan perkiraan sumber daya gas alam yang dimiliki di wilayah tersebut. Dalam rencana yang dikeluarkan oleh Shell dan Eni dalam pengelolaan Blok OPL 245, berjanji akan memberikan keuntungan kepada pemerintah sebesar \$ 22,760 million per barrel atau 46% dari produksi yang dilakukan oleh Shell dan Eni, ditambah lagi sesuai dengan kesepakatan Shell dan Eni akan menambahkan bantuan terhadap pendidikan sebesar 1,065 million, keuntungan yang diberikan kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah Nigeria untuk memilih Shell dalam melakukan eksplorasi di Blok OPL 245.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan, berdasarkan Prinsip Aktor Rasional, yaitu melalui proses intelektual, yang mana pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Nigeria untuk terus mendukung operasi Perusahaan Shell di negaranya berdasarkan pada keuntungan secara rasional yang telah dikalkulasi oleh pilihan-pilihan secara ekonomis, sehingga akan lebih baik jika pemerintah tetap mempertahankan Shell dibandingkan dengan pemerintah menutup operasi Shell dan menyerahkannya kepada perusahaan yang lain. Dalam model aktor rasional, Nigeria memikirkan untung rugi dari dukungannya terhadap Shell, pemerintah Nigeria sendiri berfikir bahwa apa bila pemerintah tidak mendukung atau memilih Shell maka akan merugikan bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah Nigeria takut akan terganggunya produksi minyak yang sudah terjalin dengan Shell, ditambah lagi dengan tekanan oleh Shell melalui BIT akibat dari sengketa Blok OPL 245 dengan Malabu. Namun, bila di analisis melalui dampak yg diberikan kepada masyarakat maka kerugian tersebut akan berdampak kepada ekonomi masyarakat Nigeria terutama petani dan nelayan.

Dalam hal ini, adanya perbedaan keuntungan yang didapatkan oleh Nigeria, karena ternyata setelah ditelusuri bahwa pihak yang paling diuntungkan dari eksplorasi Shell di Nigeria selain perusahaan itu sendiri, pemerintah pun juga ikut diuntungkan. Pada kasus ini, pembayaran atas hak OPL 245 yang telah diberikan oleh Shell kepada pemerintah tidak digunakan untuk kebutuhan negara, yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan di Nigeria. Akan tetapi, dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi penyelenggara Negara Nigeria.

Selain itu hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat karena tidak adanya kompensasi ketika terjadi dampak dari produksi di Blok OPL 245 oleh pemerintah, hal ini kemudian dapat memberikan dampak munculkan gerakan-gerakan anti pemerintah yang dapat mengganggu keamanan negara tersebut.

Kesimpulan

Shell Petroleum Development Company (SPDC) merupakan perusahaan minyak yang sudah lama berada di Nigeria dan merupakan perusahaan minyak yang memberikan keuntungan yang besar kepada Pemerintah Nigeria melalui royalty dan pembayaran pajak, namun dalam pengelolaannya perusahaan minyak ini sudah banyak memberikan dampak buruk bagi masyarakat Nigeria sehingga memunculkan berbagai bentuk protes.

Namun pemerintah terus memberikan dukungannya salah satu nya adalah dengan memberikan pengelolaan Blok OPL 245 kepada SPDC, hal ini kemudian memiliki berbagai alasan dari pemerintah sendiri, seperti potensi keuntungan dari royalty dan pajak yang diberikan kepada pemerintah ketika SPDC melakukan produksi di Blok OPL 245, selain itu pemilihan SPDC juga dikarena teknologi yang digunakan

dapat memberikan produksi minyak yang lebih banyak dan tentu saja keuntungan dari hasil penjualan minyak yang juga besar kepada pemerintah.

Bila dilakukan analisis dengan menggunakan teori pengambilan keputusan dalam rational actor model, keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria sudah dianggap masuk akal karena dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, walaupun dampak kepada masyarakat tidak sebanding, namun dalam hal ini pemerintah tidak memperdulikan keadaan tersebut.

Keputusan ini kemudian yang menjadikan pemerintah terlihat lebih memikirkan keuntungan secara pribadi dari pada kebersamaan dalam kesatuan suatu negara, yang dimana mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan keuntungan pribadi setiap aktor dalam pemerintahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Africa Investor dalam The Ecumenical Council for Corporate Responsibility "Shell in the Niger Delta: A Framework for Change". (Februari, 2010). <https://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00020052:f1951c2ce1554d231761a0196fbc9b5b.pdf>.
- Agustin, Dian Fitriani. 2014. "Permasalahan Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Minyak: studi kasus Shell di Nigeria, Skripsi: FISIP Universitas Indonesia
- Amunwa, Ben. 2012. Dirty Work: Shell's Security Spending in Nigeria and Beyond. Halaman 3. Tersedia di, <https://platformlondon.org/wp-content/uploads/2012/08/Dirty-work-Shell%E2%80%99s-security-spending-in-Nigeria-and-beyond-Platform-August-2012.pdf>, diakses pada 27 April 2021
- Azura. 2018. "Pengaruh Respon United Nations Environment Programme (UNEP) Terhadap Masalah Tumpahan Minyak Di Delta Niger, Nigeria Tahun 2011 - 2017, Skripsi : Universitas Riau.
- Bamberg, James. 2000 British Petroleum and Global Oil 1950-1975: The Challenge of Nationalism: Cambridge University Press.
- Best Ordinioha dan Seiyefa Brisibe, "The human health implications of crude oil spills in the Niger delta, Nigeria: An interpretation of published studies", Nigerian Medical Journal. Vol.54
- Burger, Andrew. 2011. Shell in Nigeria: Oil, Gas, Development & Corporate Social Responsibility
- Chairawaty, Fahnia. 2014. "Konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat di Nigeria (studi kasus: ogoni, negara bagian rivers state", tahun 1993 - 1998), Skripsi: FISIP Universitas Indonesia.
- Graham Allison. 1999. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd Edition. (New York: Longman (google ebook)
- Hubert, Don. 2018. Government Revenues from OPL 245 Assessing the Impact of Different Fiscal Terms terdapat di <https://www.globalwitness.org/documents/19525/R4D-Nigeria245-GovernmentRevenueAnalysis-Final.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- Lindén, Olof. 2013. Oil Contamination in Ogoniland, Niger Delta" tersedia di <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758819/>
- Malabu Oil Scandal: Italian Prosecutor Says Corrupt Firms Destroy Nigeria, Others", tersedia di <http://saharareporters.com/2019/10/23/malabu-oil-scandal-italian-prosecutor-says-corrupt-firms-destroy-nigeria-others>

- Mochtar Maso'ed 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. (Jakarta: LPE3S) hlm 275
- Nigeria and Benin", tersedia di <https://reports.shell.com/investors-handbook/2013/upstream/africa/nigeria-and-benin.html>
- Nigeria merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak amat melimpah", tersedia di <https://id.scribd.com/document/379486243/Nigeria-Merupakan-Salah-Satu-Negara-Yang-Memiliki-Cadangan-Minyak-Amat-Melimpah>
- Ogundana (et all). 2017. Impact of Direct and Indirect Tax on the Nigerian Economic Growth. R4D-Nigeria245-GovernmentRevenueAnalysis-Final.en.id.pdf
- Oil Contamination in Ogoniland, Niger Delta" tersedia di <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758819/>
- Paul, Ilesanmi Akanmidu. 2014. Petroleum and Nigeria's Economy: A Paradox of Global Reality since 1956. Vol. 4, No. 16. Department of History and International Studies Adekunle Ajasin University: Nigeria. Halaman 95. Terdapat di <https://core.ac.uk/download/pdf/234674068.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Payments to Governments terdapat di <https://www.shell.com/sustainability/transparency/payments-to-governments.html> diakses pada 27 Februari 2021
- Pembrontak di Nigeria Akhiri Gencatan Senjata", tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2010-01-31-voa4-85851857/71928.html>
- Pipa minyak di Nigeria Meledak, 260 orang tewas", tersedia di https://www.liputan6.com/global/read/3206209/26-12-2006-pipa-minyak-di-Nigeria-meledak-260orang-tewas?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3206209%2F26-12-2006-pipa-minyak-di-Nigeria-meledak-260-orang-tewas
- Prinanda, Devita. 2014. "Shell dan The Movement for the Survival of the Ogoni People dalam Pelanggaran HAM di Nigeria, Skripsi: FISIP Universitas Indonesia.
- Royal Dutch Shell plc Financial and Operational Information tersedia di <https://www.shell.com/investors/financial-reporting.html>
- Sayne, Aaron Alexandra Gillies dan Andrew Watkins. 2017. Dua belas bendera merah : risiko korupsi dalam pemberian izin dan kontrak di sektor ekstratif ,tersedia di <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/twelve-red-flags-bahasa-indonesia.pdf>.
- The History of Shell In Nigeria", tersedia di <https://www.shell.com.ng/about-us/shell-Nigeria-history.html>
- Wardhany, Adinda Koesumo. 2015. "Kondisi Paradox of Plenty dan Kemunculan Kelompok Movement for the Emancipation of Niger Delta (MEND) di Delta Niger", Skripsi, Universitas Gadjah Mada,
- Words by, tersedia di <https://www.triplepundit.com/story/2011/shell-nigeria-oil-gas-development-corporate-social-responsibility/75266> diakses pada 27 April 2021
- Yar'Adua ajak MEND akhiri konflik", <https://internasional.kompas.com/read/2009/11/16/02073684/yaradua.ajak.mend.akhir.konflik>.